

ABSTRAK

Pemagangan Didalam Negeri adalah pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Tingginya angka pengangguran, kesiapan kompetensi kerja dari tenaga kerja, serta terdapat penyimpangan terhadap peserta Pemagangan Didalam Negeri merupakan hal yang melatarbelakangi perlunya diadakan kajian mengenai perlindungan Hukum bagi Pemagangan Didalam Negeri. Rumusan masalah yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Status peserta pemagangan didalam negeri dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pemagang Didalam Negeri jika terjadi pelanggaran. Dari hasil penelitian, status peserta Pemagangan Didalam Negeri tidak sama dengan status Pekerja. Selanjutnya mengenai upaya hukum jika timbul perselisihan yaitu: melalui litigasi (in/by court dispute settlement) atau non-litigasi (out of court dispute settlement) yang diperinci menjadi mediasi (perdamaian), lembaga perundingan bipartit, , arbitrase, dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata Kunci : Pemagangan Didalam Negeri, Status Peserta Pemagangan Didalam Negeri, Upaya Hukum.

ABSTRACT

State Apprenticeship is held by a company domiciled in the Republic of Indonesia as stipulated in Laws number 13 year 2003 on Manpower jo Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia Number PER.22 / MEN / IX / 2009 on the Implementation of the Within State. The high rate of unemployment, jobless competence of the workforce, and there are violations from the Apprentice is the background of holding a study for the Legal Protection of State Apprenticeship. The problems used in this thesis are the status of State Apprentice and Legal Remedies that can be done by the State Apprentices In case of violations. From the research, the status of state apprentices are different with workers. Furthermore legal remedies if there is dispute: through litigation (in / by court dispute settlement) or non-litigation (out of court dispute settlement) which is specified into mediation, bipartite mechanism, arbitration, conciliation, and through Industrial Relations Court.

Keywords: State Apprenticeship, The Status of State Apprentices, Legal Remedies.